**ALASAN PENGGUNAAN PMSC OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBERONTAKAN DI IRAK TAHUN 2013**

**Galang Vilmantara[[1]](#footnote-1)**

***Abstract*** *The results of this study shows that the use of PMSC in the 2013 Iraqi riots by the United States was for three reasons. The first reason for using PMSC frees the US from responsibility for what personnel in the field do. This act disavowment is a form of the US in maintaining its political image. The next reason is the use of PMSC being the more economical option. The third reason is because of the many forms of objections by the global community to the United States, which at that time could no longer place the country's armed forces due to the end of the Iraq war in 2011. The presence of PMSC in Iraq on the 2013 Iraqi Insurgency was at first as a presence of power which deters the colliding sides that aims to take over the then-empty Iraqi government. But in the end, the decision to pull back the PMSC inbetween 2013 by The USA instead smoothen the violent act done by the colliding sides which became the catalyst for Iraqi Civil War 2014.*

***Keywords: PMSC, Iraqi Insurgency, Decision Making, United States of America***

**Pendahuluan**

Private Military and Security Company adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa keamanan atau bantuan personel bersenjata dalam bentuk sistematik dan militeristik PMSC juga menawarkan jasa risk management dari suatu potensi untuk klien dengan melalui pelatihan atau jasa lain, seperti bantuan logistik, pengadaan perlengkapan, dan pengumpulan inteligen (Ortiz, 2010). Biasanya PMSC merekrut mantan militer, pasukan khusus, sampai spesialis teknisi yang bisa melatih atau mengoperasikan suatu peralatan. Contoh sistem kerjanya, pada suatu PMSC mereka menerima kontrak pemerintah untuk memberikan pengamanan pada suatu tempat (seperti markas militer di luar negeri, maupun kantor departemen negara). PMSC tersebut akan mengirimkan personal yang akan bertugas mulai dari menjadi satpam sampai menjadi pasukan paramiliter di negara lain.

PMSC ini dimanfaatkan dalam beberapa perang baik oleh negara-negara seperti AS, Irak, Inggris dan Perancis sampai organsisasi non pemerintah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun. Menurut laporan *Global Policy Forum* 2012, pada awal tahun 2000-an penggunaan PMSC oleh PBB meningkat dan menjadi pengaruh yang kuat dalam laporan kebijakan keamanan PBB (Pingeot, 2014). Terjadi peningkatan jumlah kontrak PBB terhadap PMSC sebesar 73% dari tahun 2009 dari 44 juta dollar menjadi 76 juta dollar pada tahun 2010. Jasa PMSC yang digunakan oleh PBB antara lain pengamanan bersenjata dan tak bersenjata, penanggulangan dan manajemen resiko, pelatihan keamanan, bantuan logistik dan konsultasi. PBB juga menggunakan jasa PMSC sebagai pasukan perdamaian selama masa invasi AS ke Afganistan tahun 2001 sampai 2011 dan invasi AS ke Irak tahun 2003 sampai 2013 (Pingeot, 2012).

Sementara itu negara yang paling banyak menggunakan jasa PMSC adalah AS. Penggunaan PMSC oleh pemerintah AS semakin meningkat pasca serangan 11 September 2001 yang berujung korban jiwa mencapai 2,996 orang, dengan 19 diantaranya adalah teroris (CNN Library. *September 11th Terror Attacks Fast Facts*. CNN: 2017). Akhir dari kejadian tersebut, Presiden Bush mengeluarkan Bush Doctrine yang menyatakan pentingnya serangan pencegahan (pre-emptive strike) serta perintah untuk menginvasi negara yang menyembunyikan kelompok teroris. Akhirnya pemerintah AS mengirimkan banyak pasukan angkatan bersenjata negara dan Kontraktor PMSC ke Timur Tengah.

Pada tahun 2011 terjadi kerusuhan di Irak akibat ditariknya angkatan bersenjata AS yang sudah berada di sana sejak tahun 2003. Penarikan pasukan AS tersebut menyebabkan instabilitas politik dan keamanan yang melibatkan pemerintah bersama kelompok religius Syiah dan sebagian masyarakat Irak yang beraliran Sunni. Kerusuhan ini berlangsung hingga tahun 2013 yang selanjutnya melibatkan lebih banyak pihak di dalamnya. Pemerintah Irak pada saat itu didukung oleh beberapa PMSC asal AS. Dalam kejadian tersebut, terjadi konflik bersenjata antara pemerintah Irak yang terdiri dari pasukan angkatan bersenjata negara, serta personel private military dukungan AS dengan sekte kelompok religius Shi’a (Hizbullah dan pasukan Mahdi dan Badar) yang didukung oleh Iran dan Sunni (Islamic State of Iraq).

Kekacauan di Irak memuncak pada tahun 2013 dan berujung pecahnya perang saudara pada 2014. Hingga 2014 kekacauan ini menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil sebanyak 20,218 orang. Pada tahun yang sama, anggota tim administrasi Obama, Caitlyn Hayden, meminta 500 juta dollar AS dari Kongres AS untuk biaya pengiriman PMSC ke Irak untuk melatih dan membantu pasukan pemerintah Irak melawan ISIS. Keberadaan PMSC ditambah kericuhan yang sedang berlangsung, dianggap sebagai penyebab pecahnya Perang Saudara Irak 2014 – 2017.

Pada tahun 2015 terhitung ada lebih dari 150,000 personel PMSC di Irak yang dikontrak oleh Departemen Pertahanan AS. Jumlah ini sepuluh kali lebih banyak dari yang jumlah dikirim pada masa Perang Teluk( https://web.archive.org).

**Kerangka Teori**

***Teori Pembuatan Kebijakan***

Menurut James A.F. Stoner, Decision Making adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Menurut James N. Rosenau, pengambilan kebijakan luar negeri atau foreign policy adalah: Keputusan seorang individu, musyawarah suatu komite, hasil dari proses pembuatan kebijakan, pendapat sejumlah kelompok yang berbeda kepentingan, nilai-nilai elite yang dominan, produk dari aspirasi masyarakat, penguatan tradisi sejarah, sebuah respon terhadap peluang atau tantangan dunia. (Stoner,1986) Interaksi antara tujuan nasional dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut adalah subjek mutlak dalam suatu negara. Unsur-unsur politik luar negeri pada setiap negara baik negara besar maupun kecil adalah sama. Menurut pemikiran James N. Rosenau, ada lima variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Rosenau,1982), yaitu:

* 1. Variabel Individu atau ideosinkretik berkaitan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Artinya dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis. Pengaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya. Umumnya negara yang kebijakannya ditentukan oleh keputusan individu adalah negara otoriter, atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi.
	2. Variabel kelompok dapat didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau aturan-aturan perilaku yang diharapkan publik kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan memandang bahwa keputusan final yang merupakan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan manifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lain yang mempunyai posisi strategis dan kepentingan tertentu di pemerintahan dan berusaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah. Variabel ini digunakan untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis. Contohnya American Comitee for Israel akan selalu mendorong pemerintah AS untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang menguntungkan Israel.
	3. Variabel birokrasi, menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Allison yang memperkenalkan variabel ini mengatakan bahwa dengan memandang politik sebagai rencana-rencana yang diturunkan secara rasional yang dirancang untuk memaksimalkan kepentingan utama unit-unit abstrak dan monolitik yang kita sebut negara. Artinya keputusan tidak dipandang sebagai produk rasionalitas individu tetapi lebih merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi. Jadi, kebijakan luar negeri merupakan proses politik yang meliputi bargaining, kompromi dan adjustment antar biro pemerintah, dinas militer dan divisi-divisi lainnya.
	4. Variabel nasional, mencakup berbagai atribut nasional yang turut mempengaruhi hasil politik luar negeri, termasuk pula di dalamnya unsur-unsur power, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan nasional. Interaksi antar unsur-unsur tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem yang berupa sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial-budaya bagi negara tersebut. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional masing-masing negara. Misalkan tindakan Korea Utara yang menutup diri dari pasar global dikarenakan negara tersebut menganut ideologi self-reliance.
	5. Variabel sistemik (global system) memandang pentingnya pengaruh lingkungan eksternal suatu negara terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara tersebut. Lingkungan eksternal yang dimaksud meliputi struktur atau keadaan sistem internasional dan proses sistem internasional yang meliputi struktur hubungan antar negara-negara besar, regional, aliansi, rezim internasional, hubungan bilateral atau multilateral, serta faktor situasional seperti isu dan krisis.

Menurut Graham T. Allison, ada tiga model yang mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:

1. Model aktor rasional. Dalam model ini, politik luar negeri dianggap sebagai akibat dari tindakan aktor rasional, khususnya para elit pembuat kebijakan, dimana prosesnya digambarkan sebagai proses intelektual sehingga analisis politik luar negeri harus difokuskan pada analisis kepentingan nasional dan tujuan suatu negara.

2. Model organisasi. Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar, yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan kebijakan tidaklah hanya sebuah proses intelektual, tapi merupakan proses mekanik, dimana keputusan tersebut berlandaskan pada keputusan-keputusan yang pernah dibuat di masa lalu, sesuai prosedur atau pada Standard Operating Procedure di organisasi itu.

3. Model birokratik. Menggambarkan bahwa politik internasional itu adalah sebuah proses tawar menawar antar pemerintah negara. Dalam proses tawar-menawar tersebut, agen pemerintah menawarkan alternatif untuk menetapkan kebijakan luar negeri. Menurut Allison, ada dua elemen dalam politik birokratik:

I. Proses organisasi, yaitu suatu pemerintah (government) yang berisi seperangkat organisasi, yang mana sebagian besar pekerjaan organisasi tersebut adalah pekerjaan rutin sesuai dengan hasil keputusan di masa lalu, yang terpaku dengan SOP yang sudah disepakati.

II. Proses birokrasi adalah model yang memfokuskan perhatian ke individu-individu yang ada di dalam pemerintahan serta interaksi antar mereka. Seperti penentuan tindakan suatu pemerintahan dalam politik internasional. Ide utama politik birokrasi adalah bahwa keputusan pemerintah adalah hasil suatu elaborasi permainan politik.

**Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif yang akan menjelaskan alasan penggunaan PMSC oleh AS dalam kasus Pemberontakan di Irak tahun 2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah document-based research dan internet-based research dengan mencari sejumlah literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dalam bentuk content analysis yang menganalisis isi dari sumber-sumber yang didapat dan menjelaskan dengan kerangka konseptual yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

**Hasil dan Pembahasan**

Amerika Serikat menjadi negara pengguna PMSC terbesar di dunia, diikuti oleh Inggris, Rusia dan Australia. Penggunaan tentara bayaran oleh AS sudah dilakukan sejak masa perang saudara dan perang revolusi AS. Pemberontakan di Irak menjadi salah satu kasus terbesar penggunaan PMSC oleh AS. Jika dilihat dari Teori Pembuatan Kebijakan*,* Pemerintah Amerika Serikat memilih untuk menggunakan PMSC dari beberapa alternatif karena beberapa alasan. Adapun beberapa alasan tersebut, antara lain adalah:

**Faktor Politik**

Pilihan untuk menggunakan PMSC sebagai alternatif dibandingkan militer negara dilakukan karena entitas pengontrak jasa PMSC bisa terbebas dari akuntabilitas jika terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti tindak kejahatan perang, pelanggaran HAM, atau korban jiwa dari PMSC yang terlalu banyak, Pengontrak jasa PMSC bebas dari tanggung jawab atas apa yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya Non-Disclosure Agreement yang ditandatangani oleh pihak pengontrak dan yang dikontrak. NDA tersebut berisikan bahwa apapun misi atau tujuan yang diberikan dari negara yang mengontrak kepada PMSC akan dirahasiakan bahkan sampai misi atau tujuan tersebut tercapai. Sering juga terjadi sebuah Mission Creep (misi merayap) dimana misi awal yang diberikan kepada PMSC tersebut bukanlah misi asli yang dimaksud, sehingga ketika personel PMSC sudah dilapangan barulah pengontrak jasa mengirimkan misi atau tujuan baru yang merupakan alasan sebenarnya mereka mengontrak PMSC.

Kebebasan dari tanggung jawab ini digunakan sebagai salah satu alasan bagi suatu negara untuk menggunakan PMSC. Dalam kasus Amerika Serikat sendiri, pemindahan dari angkatan bersenjata negara menjadi PMSC dalam masa Pemberontakan di Irak tahun 2013 menjadi salah satu usaha negara untuk memperbaiki citra politik. Penggunaan PMSC oleh pemerintah Amerika Serikat dilakukan ketika ketika pergantian kekuasaan dari George W Bush menjadi Barack Obama. Presiden Bush dengan doktrin Bush nya mengatakan pentingnya melakukan pre-emptive strike berupa invasi dan okupasi militer AS ke Irak guna memberantas jaringan-jaringan teroris yang disinyalir bermarkaskan di Irak. Namun Doktrin dan Doktrin Rumsfeld dianggap tidak lagi relevan setelah naiknya Barack Obama menjadi presiden.

Setelah pergantian presiden, Presiden Obama mulai memperbaiki citra politik pemerintahan Amerika Serikat. Dalam masa kampanye Obama mengatakan akan memperbaiki image Amerika Serikat dari yang semulanya bisa dibilang pemerintahan yang warmongering menjadi pemerintah yang enforcing democration dan akan mengeluarkan hukum yang mengatur tentang batas kapasitas, pendanaan, serta akuntabilitas terhadap personel kontraktor jika terbukti melakukan pelanggaran perang atau kemanusiaan dan akan mengurangi ketergantungan terhadap PMSC oleh AS.

Namun setelah Obama terpilih menjadi Presiden AS tidak aturan atau regulasi yang dijanjikan tidak kunjung dibuat, dan bahkan administrasi Obama malah semakin berkegantungan terhadap PMSC. Stanley (2015) berargumen bahwa pada masa pemerintahan Obama terjadi perpindahan fungsi dari militer negara menjadi PMSC.

Alasan pergeseran ketergantungan dari militer ke PMSC oleh administrasi Obama dijelaskan oleh Stanley (2015), Isenberg (2008), dan Zenko (2016). Stanley menyatakan bahwa PMSC digunakan oleh Obama karena terjadinya de-ekalasi konflik sehingga mengurangi perlunya beradaan militer di lapangan. Isenberg berargumen bahwa penggunaan PMSC dilakukan karena kurangnya dukungan dari masyarakat dalam perang Irak dan permintaan masyarakat global untuk menarik pasukan militer AS dari Irak. Sementara Zenko menyatakan bahwa penggunaan PMSC oleh Administrasi Obama dilakukan sebagai bentuk strategi baru pemerintah AS dalam menanggulangi konflik di timur tengah.

Penggunaan jasa PMSC juga sendirinya merupakan hal yang kontroversial dan membawa media buruk terhadap suatu negara yang menggunakan jasanya sehingga seringkali entitas besar seperti negara yang ingin menggunakan jasa PMSC biasanya melakukannya menggunakan perusahaan kecil milik negara dan melakukan kontrak dengan PMSC atas nama perusahaan tersebut.

Fakta bahwa penggunaan PMSC adalah kebijakan yang kontroversial terbukti bukan hanya dari bentuk citra buruk yang diterima oleh entitas pengontrak, namun dari PMSC itu tersebut. Adapun beberapa contoh kasus kontroversi PMSC serta bentuk cuci tangan pemerintah pengontraknya, antara lain:

**1. ACADEMI.**

 Pada awalnya, ACADEMI bernama Blackwater, namun pada tahun 2007 terjadi pelanggaran perang yang dilakukan oleh personel Blackwater dimana beberapa orang kontraktor melakukan penembakan terhadap warga sipil di Nisour Square, Baghdad pada saat sedang menjalankan misi pengamanan konvoi kedutaan AS. Akibatnya 14 orang meninggal dan 20 orang lainnya terluka. Kejadian ini ditambah dengan adanya rumor yang menyatakan bahwa Blackwater melakukan penyelundupan senjata ke Timur Tengah memperburuk citra Blackwater sebagai sebuah perusahaan.

Setelah kejadian ini, tanggung jawab yang diterima Blackwater dinilai terlalu kecil dibanding dengan perbuatannya, dimana Blackwater hanya kehilangan kontrak dengan pemerintah AS ke PMSC Triple Canopy. Pada tahun 2009, Blackwater berusaha menjauhkan diri dari kejadian ini dengan melakukan reformasi perusahaan dan mengubah nama menjadi Xe Services. Akhirnya Xe turut bergabung dalam Constellis Group yaitu payung organisasi PMSC terbesar di AS.

**2. DynCorp.**

 Pada tahun 1990, 2 orang personel DynCorp yang bertugas di Bosnia dan Herzegovina dibebastugaskan oleh perusahaan setelah dilakukannya investigasi dan terbukti bahwa kedua orang tersebut melakukan kejahatan pedofilia dan perdagangan anak dan wanita. Dalam kasus ini, tidak jelas siapa entitas pengontrak perusahaannya sehingga entitas tersebut terbebas dari tanggung jawab dan bahkan karena NDA tetap menjaga anonimitasnya.

**3. Aegis Defence Service.**

Pada tahun 2005, Aegis mendapat perhatian publik, karena diunggahnya sebuah video “tropi” yang isinya beberapa personel kontraktor Aegis melakukan penembakan terhadap mobil penduduk sipil Irak. Dari video tersebut, diketahui tempat kejadian insiden tersebut berada di sebuah jalan yang dekat dengan bandara Baghdad. Pelaku penembakan tersebut tidak dikenali, tapi dari video bisa diindetifikasi bahwa pelaku penembakan memiliki aksen Skotlandia atau Irlandia.

Pihak Aegis mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari operasi absah hasil kontrak antara Aegis dan pemerintah Amerika Serikat, namun Pentagon dan Departemen keamanan AS menyangkal adanya kerjasama dengan perusahaan tersebut.

**4. Erinys International**.

Pada tahun 2004, sebuah artikel dirilis yang menunjukan bahwa Erinys melakukan penyiksaan dan melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap tahanan di Irak, beberapa jurnalis melakukan testimoni bahwa kontraktor Erinys melakukan penyiksaan kejam terhadap remaja Irak berusia 16 tahun dalam sebuah investigasi militer.

Bukti penyiksaan tersebut beredar di Internet dalam bentuk sebuah foto yang di dalamnya seorang remaja di ikat tangan dan badannya menggunakan 6 buah ban mobil bekas. Juru bicara Erinys mengatakan bahwa perlakuan tersebut dilakukan hanya atas dasar Scare Tactic dimana ketika remaja tersebut menangis, langsung dipulangkan oleh personel PMSC tersebut. Amnesty International mengenai masalah ini mengatakan “Kami memiliki keprihatinan yang serius mengenai pertanggungjawaban militer swasta dan perusahaan keamanan yang beroperasi di Irak. Mereka harus diatur dan dipantau dengan baik, dan beroperasi dengan cara yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter.”

**B. Faktor Ekonomi**

Penggunaan PMSC dalam konflik dianggap lebih ekonomis jika dibandingkan menggunakan militer AS. United States Congressional Budget Office (USCBO) menyatakan, bahwa 80% personel PMSC yang dikontrak AS dibayar sebagai ‘Spesialis penjaga keamanan’ dengan gaji 1,612 Dollar AS per harinya, atau sekitar 580,000 pertahun. Isi kontrak tersebut juga termasuk orang-orang yang menjadi supervisi para spesialis, dan orang-orang yang menjadi bantuan bagi sang spesialis, seperti personel administrasi dan teknisi medis. USCBO mengibaratkan perbandingan personel kontraktor PMSC dengan militer bagaikan pasukan infantry ringan tanpa kendaraan baja.

USCBO menghitung tiga macam biaya dalam perbandingan PMSC dengan Militer, yaitu: biaya personel militer, biaya operasi, dan biaya peralatan. Biaya personel militer mangacu pada gaji perorang perharinya, yaitu sebesar 231 Dollar AS perharinya atau sekitar 84,000 pertahun. Tapi biaya tersebut belum termasuk keuntungan-keuntungan lainnya bagi personel militer tersebut, seperti perawatan kesehatan gratis bagi seluruh keluarga personel tersebut, serta tunjangan pensiun jika personel militer tersebut mengalami luka berat dalam medan perang, serta bayaran berupa uang tunai dalam masa non-konflik (Peacetime Compensation) .USCBO menperkirakan sekiranya menggandakan pembayaran tunai saat memperkirakan pembiayaan personel tahunan untuk militer untuk di Irak, kemudian ditambah semua biaya-biaya khusus untuk tentara di lapangan seperti biaya bahaya penembakan dan penyerangan, sebesar 273 Dollar AS per bulan, biaya kesulitan bertugas, sebesar 121 Dollar AS per bulan, dan untuk tentara yang memiliki tanggungan, dan jauh dari keluarga sekurang-kurangnya 30 hari biaya perpisahan dengan keluarga sebesar 304 Dollar AS per bulan. Jadi bisa diibaratkan, seorang anggota militer yang berada di garis depan terancam bahaya, dengan tugas yang sulit serta terpisah dari keluarganya, sedikitnya mendapatkan 7,600 Dollar AS per bulannya.

Sistem Pembiayaan militer oleh USCBO dibagi menjadi 2, yaitu personel militer di markas (Homebase) dan di lapangan (Overseas) untuk rotasi. Sementara personel militer di lapangan menjalankan tugas, personel di markas bersiap-siap untuk pengiriman ke lapangan, berlatih, serta menjaga peralatan dan kendaraan perang tetap operasional sampai digunakannya. Biaya operasional tersebut dibayar menggunakan apropriasi pemeliharaan dan operasional militer perbulannya. Kemudan USCBO juga menghitung biaya pemeliaharaan kendaraan dan peralatan yang diestimasi memiliki jangka usia 20 tahun, sehingga untuk pertahunnya USCBO menganggarkan dana seperduapuluh untuk biaya pemeliharaan.

Pada tahun 2008, USCBO mengestimasi total pembiayaan militer sebesar 198 juta Dollar AS untuk pembiayaan di markas dan di lapangan. Dengan fungsi yang sama, PMSC Blackwater hanya membutuhkan biaya sebesar 99 juta Dollar AS. Sehingga pemerintah AS bisa berhemat sampai 100 juta Dollar AS dengan mengontrak PMSC. Pembiayaan militer dan PMSC juga berbeda dalam waktu non konflik. Dimana pemerintah tidak perlu memperbarui kontrak mereka dengan PMSC pasca konflik berakhir. Sementara itu, pemerintah AS harus membayar sekitar 60 sampai 80 juta Dollar AS kepada militer dalam suatu masa non konflik (Peacetime Compensation).

 Pada tahun fiskal 2013 Amerika Serikat mengeluarkan biaya sebesar 614,8 miliar dollar AS yang dibagi 2 yaitu 527,5 milliar Dollar AS untuk biaya operasi markas dan 87,3 miliar Dollar AS untuk membantu Overseas Contingency Operations (OCO) Termasuk didalamnya juga pengeluaran untuk pembayaran PMSC. Anggota senior Think tank Washington DC, Sean McFate mengatakan penggunaan kontraktor sangat murah, Congressional Budget Office, kantor federal yang mengeluarkan dana dan informasi ekonomi kepada kongres menyadari bahwa biaya sebuah batalion infantri dalam perang seharga 110 juta Dollar AS per tahun, sementara kontraktor PMSC hanya seharga 99 juta dollar AS. Dalam masa damai, biaya yang bisa di hemat lebih besar lagi. Unit infantri akan memiliki biaya perawatan sebesar 60 juta Dollar AS, sementara kontraktor tidak perlu biaya, karena kontraknya bisa diakhiri. Contoh lain yaitu pada masa pemberontakan Sierra Leone tahun 1995 sampai 1997 , PMSC Executive Outcome dibayar 1,2 juta Dollar AS perbulan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, dan mereka berhasil melakukannya, sementara pasukan perdamaian PBB yang dibayar 47 juta Dollar AS perbulan malah gagal dalam menjalankan tugasnya.

Perbandingan biaya Militer dan PMSC bisa dilihat dalam tabel berikut:

|  |
| --- |
| **Contoh Pembiayaan Unit Infantri (Dollar AS 2008)** |
| Jenis Biaya | Unit di lapangan | Unit di markas | Total Biaya | Biaya PMSC |
| Personel Militer | 26,500,000 | 80,800,000 | 107,300,000 |   |
| Biaya Operasional | 40,400,000 | 20,400,000 | 60,800,000 |   |
| Pemeliharaan Peralatan | 486,000 | 158,000 | 644,000 |   |
| Total Biaya | 67,386,000 | 101,358,000 | 168,744,000 | 119,885,778 |

1. **Faktor Sosial**

Selain alasan ekonomi, penggunaan PMSC oleh AS juga dilakukan atas dasar penolakan masyarakat internasional terhadap Perang Irak. Banyaknya penolakan dan protes tersebut berhubungan dengan faktor politik. Tercatat sepanjang Perang Irak dari tahun 2002 sampai tahun 2012, sekurang-kurangnya ada lebih dari 3000 kasus demonstrasi yang bertujuan memprotes perang Irak. Dengan jumlah pada tahun bulan Januari-April 2003 sudah mencapai 36 juta massa. Tingkat penolakan terhadap tindakan AS sangat besar dari seluruh dunia, termasuk di Eropa dimana terjadi pengerahan massa berjumlah 3 juta orang di Roma dan menjadi demonstrasi anti perang terbesar menurut *Guinness Book of Records.* Di Amerika Serikat meskipun terdapat beberapa kalangan yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menginvasi Irak, pada kenyataannya, kebijakan ini tetap mendapatkan protes dari rakyat dalam bentuk demonstrasi.

**Daftar Protes dan Demonstrasi Terhadap Perang Irak**

|  |
| --- |
| 2002 |
| September  | Lebih dari 1,000 orang melakukan protes “No Blood for Oil” di depan gedung PBB di New York. |
| Oktober | Koalisi ANSWER dan NION melakukan protes sebesar 100,000 orang lebih di Washington, dan lebih dari 50,000 orang di San Fransisco. |
| 2003 |
| Januari | Pada bulan Januari Lebih dari 95,000 orang melakukan demonstrasi yang terbagi di Washington DC, San Fransisco, Seattle dan Nebraska. |
| Februari | Di Februari, Jutaan orang di Seluruh dunia melakukan protes serentak di 800 kota. Guinness Book of Records mencatat kejadian ini sebagai protes terbesar dalam sejarah manusia. Protes berlangsung di Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Swiss, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Suriah, India, Rusia, Korea Selatan, Jepang, bahkan stasion McMurdo di Antartika protes terbesar terjadi di Barcelona, dengan sekitar 1 juta orang turut berpartisipasi. Termasuk di antara para demonstran yaitu pimpinan partai liberal demokrat Inggris, Charles Kennedy dan walikota London Ken Livingstone |
| Maret | Pada 8 Maret, sekitar 10,000 orang melakukan demonstrasi di ibu kota Manchester. Selanjutnya pada 15 Maret, sekurang-kurangnya 400,000 orang di Milan melakukan demonstrasi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintahnya untuk menolak perang di Timur Tengah. Sementara itu 300,000 orang di Barcelona berpegangan tangan membuat rantai manusia. Di Hamburg, Jerman 20,000 siswa sekolah melakukan protes di depan kantor kedutaan AS, tapi terjadi konflik yang dimulai ketika para siswa mulai melempari batu sehingga dibalas dengan meriam air oleh aparat polisi. Di Derry, Irlandia, lebih dari 10 orang memaksa masuk ke dalam kantor PMSC *Raytheon* sampai akhirnya ditangkap.Di Australia, pemerintahan, instansi, dan institusi di kota Brisbane dan Hobart melakukan mogok kerja.Di Asia, sekitar 100,000 orang warga Indonesia melakukan demonstrasi di kedutaan AS di Jakarta, sementara itu di Korea Selatan biksu-biksu budha melakukan ritual untuk menenangkan jiwa-jiwa korban perang. Di India 17,000 orang melakukan demonstrasi dengan melakukan mogok kerja. Di Jepang, masyarakat melakukan demonstrasi di pangkalan militer AS di Okinawa. Tiongkok baru mendapatkan ijin dari pemerintah untuk melakukan demonstrasi pada akhir bulan Maret, dan di demonstrasi tersebut hanya dihadiri oleh 200 orang.Di Afrika, ribuan orang melakukan demonstrasi di Mombasa, Kenya dan Moghadisu, Somalia. Dan juga terjadi bentrok antar demonstran dan aparat polisi di Bahrain.Di AS, lebih dari 50,000 orang melakukan *rally* di Boston. Jumlah ini menjadi jumlah protes terbesar sejak berakhirnya perang Vietnam. |
| April | Pada bulan April, terjadi bentrok antara polisi dengan demonstran di Oakland, California. Polisi menembakan peluru karet ke demonstran yang kebanyakan anak buah kapal dan pekerja pelabuhan. Demonstran tersebut memprotes tindakan *American President Lines* industri kontainer dari Singapur yang mendukung perang Irak serta PMSC *Stevedoring Services of America.* Pada tanggal 12 April, demonstran yang disponsori oleh ANSWER melakukan protes di Washington DC, San Francisco dan Los Angeles. Jumlah demonstran mencapai lebih dari 30,000 orang. |
| Oktober | Puluhan ribu masyarakat di Washington DC, San Francisco dan Reno, Nevada mulai melakukan protes dengan tuntutan penarikan pasukan militer AS dari Irak serta untuk mengakhiri okupasi Irak oleh AS. Di Washington DC demonstrasi ini disponsori oleh ANSWER |
| November | Kunjungan George Bush ke Inggris berakhir dengan sekitar 150,000 orang meruntuhkan patung berbentuk Bush di *Trafalgar Square.* |
| 2004 |
| Juni | Lebih dari 100,000 orang melakukan demonstrasi di Roma ketika kunjungan George Bush kepada Paus John Paul II yang menolak Perang Irak.Di Washington DC, ANSWER mensponsori 10,000 orang untuk melakukan *march* yang bertujuan rumah Donald Rumsfeld , Menteri Pertahanan AS |
| Agustus | Partai Republikan AS bekerjasama dengan *United for Peace and Justice* menggelar acara *2004 Republican National Convention* di *Madison Square Garden* di New York. Pada acara tersebut masyarakat berjalan membopong peti mati yang di bungkus bendera sebagai simbol tentara AS yang meninggal di perang Irak. Terdapat setidaknya 310,000 orang berpartisipasi. |
| Oktober | Terjadi acara bertema “*Mourn the dead. Heal the wounded. End the War”* di *Women’s Memorial*, pemakaman nasional Arlington. |
| November | Sekitar 10,000 orang menghadiri *Million Worker March* di Washington DC. |
| 2005 |
| Januari | Puluhan ribu orang melakukan protes di Washington DC pada 20 Januari 2005, yaitu hari masa pemerintahan terpilih kedua pertama George W Bush. |
| Maret | 19 Maret 2005 menjadi peringatan hari jadi dimulainya perang Irak. Di seluruh dunia jutaan orang melakukan protes terhadap perang Irak dan okupasi AS di Irak.  |
| Juni | Pada 21 Juni 2005, mayor Florian Pfaff dari militer Jerman dibebastugaskan setelah menolak untuk turut berpartisipasi dalam pembuatan *software* yang akan digunakan dalam perang Irak. |
| September | Sekitar kurang lebih 200,000 orang melakukan protes anti perang Irak di seluruh dunia. Diantaranya Inggris, dan Amerika Serikat. |
| November | Masyarakat Amerika selatan melakukan protes pada George Bush yang berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi di Mar del Plata, Argentina 4-5 November 2005.  |
| 2006 |
| Maret | Terjadi peringatan hari jadi tiga tahun Perang Irak. Protes dilakukan di Baghdad, Basra, London, New York City, Washington DC, Portland, Madrid, Roma, Sydney, Tokyo, Seoul, Istanbul, Toronto dan Dublin. Di Washington DC, 200 orang memasuki gerbang Pentagon untuk meletakan peti mati palsu, akhirnya lebih dari 20 orang ditangkap. |
| April | 1 April di Atlanta, Georgia ribuan orang melakukan protes sebagai peringatan hari kematian Martin Luther King Jr.Pada 29 April, koalisi-koalisi anti perang di AS, *United for Peace and Justice, Rainbow/PUSH Coalition, National Organization for Women, Friends of the Earth, US Labor Against the War, Climate Crisis Coalition, People’s Hurricane Relief Fund, National Youth and Student Peace Coalition,* dan *Veterans for Peace* melakukan pergerakan di New York City |
| Mei | Anggota *Port Militarization Resistance* di Olympia, WA menggembok pagar dermaga yang berisikan kendaraan baja *Stryker* yang akan dikirim ke Irak. |
| Agustus | 9 orang anggota koalisi anti-perang di Derry, Irlandia Utara menusup masuk kedalam kantor PMSC *Raytheon* dengan tujuan merusak data server. Polisi kerusuhan dipanggil untuk menangkap 9 orang tersebut. |
| September | *Stop the War Coalition* menggelar konferensi tahunan partai pekerja di Manchester, sekitar 30,000 orang berpartisipasi. |
| Oktober | Organisasi anti-perang *World Can’t Wait* menyelenggarakan demonstrasi dan protes di banyak negara bagian Amerika Serikat pada 5 Oktober  |
| November | Di Chicago 3 November, Malachi Ritscher, aktivis anti-perang melakukan bunuh diri dengan membakar diri sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah AS. |
| 2007 |
| Januari | 27 Januari, ratusan ribu masyarakat memprotes pemerintah AS di Washington DC. |
| Maret | Ratusan masyarakat di Tacoma, WA berusaha melakukan sabotase pengiriman kendaraan baja *Stryker* yang berada di pelabuhan. Akhirnya 23 orang ditangkap.Pada 16-17 Maret lebih dari 50,000 orang melakukan demonstrasi secara berbarengan di seluruh dunia, diantaranya yaitu di Turki, Yunani, Kanada, Belgia dan Inggris. |
| September | Pada tanggal 15 September 2007, ANSWER dan organisasi Veterans for Peace melakukan pergerakan dari gedung putih ke gedung DPR di Washington. Demonstrasi ini berakhir rusuh dengan ditembakanya gas kimia oleh polisi, dan sekitar 190 orang ditangkap. Surat izin demonstrasi ANSWER mengatakan bahwa jumlah demonstrannya akan berjumlah 10,000 orang, namun total massa yang turun berjumlah hampir 100,000. |
| 2008 |
| Maret | Pada 19 Maret 2008, masyarakat di washington merayakan hari peringatan 5 tahun invasi AS ke Irak dengan melakukan pelemparan balon berisikan cat ke arah gedung putih dan gedung DPR. Beberapa masyarakat juga mengecat paksa gedung-gedung rekrutmen militer, dan kantor PMSC Bechtel dan Lockheed Martin. Masyarakat menuntut agar presiden George W. Bush, wakil presiden Dick Cheney, dan sekretaris negara Condoleezza Rice ditangkap atas kejahatan perang. |
| 2009 |
| Maret  | Pada tahun 2009, terjadi demonstrasi yang di lakukan di depan kantor PMSC KBR dan General Dynamics. Para demonstran meletakan peti mati palsu di depan pintu gedung kontraktor tersebut sebagai simbol korban konflik Amerika. Di tahun yang sama juga,  |
| April | United for Peace and Justice melakukan demonstrasi di Wall Street yang memprotes pengeluaran biaya militer di Irak. |
| 2010 |
| Maret | Pada 20 Maret 2010, dilakukan acara anti perang di banyak kota-kota di AS. Acara yang diorganisir oleh ANSWER ini berbarengan dengan perayaan 7 tahun sejak dimulainya invasi AS ke Irak. Ribuan orang melakukan demonstrasi ke gedung putih di Washington dan melemparkan drone palsu berbahan kardus melewati pagar. Di Los Angeles juga, ribuan orang melakukan protest di Hollywood Boulevard dengan memakai pakaian seperti zombie yang merepresentasikan korban |
| 2011 |
| Maret | Terjadi demonstrasi di Hollywood dan di depan Gedung Putih di Washington DC yang berujung ditangkapnya lebih dari 100 orang demonstran. |
| 2012 |
| Mei | Protes di Amerika serikat, terus berjalan bahkan sampai ditariknya pasukan AS pada bulan Desember 2011, dengan demonstrasi terakhir terjadi pada 20 Mei 2012. Protes ini berlangsung di Chicago dimana sekitar 8,000 veteran perang Irak memilih untuk melepaskan medali militernya. |

Sumber: Hasil pengamatan disusun oleh penulis

Pada Desember 2011, pemerintahan Obama menarik pasukan negaranya kembali ke AS. Pada saat penarikan pasukan, AS meninggalkan gedung kedutaan di Baghdad dan sekitar 17,000 pekerja yang ditempatkan di Basra, Mosul, dan Kirkuk, 5,000 orang diantaranya adalah PMSC. President Obama dan al Maliki membuat rencana kerjasama pasca perang AS dan Irak. Agendanya antara lain kerjasama sumber daya, perdagangan, edukasi, keamanan, kontra-terorisme, pengembangan ekonomi, dan penguatan institusi Irak.

 Banyaknya jumlah protes dan demonstrasi dalam bentuk penolakan Perang Irak serta permintaan penarikan pasukan militer AS dari Irak membuktikan bahwa penggunaan dan pemberian legitimasi kepada PMSC dalam kejadian Pemberontakan di Irak 2013 menjadi pilihan rasional bagi pemerintah Amerika Serikat ketika masyarakat AS dan internasional menolak keberadaan militer AS di Irak.

**Kesimpulan**

Penggunaan PMSC dalam suatu konflik merupakan hal yang kontroversial tanpa adanya regulasi yang mengatur aturan keterlibatan personel PMSC di lapangan serta adanya perjanjian Larangan pengungkapan informasi rahasia perusahaan menjadikan banyaknya perjanjian dalam gelap yang dilakukan oleh pihak pengontrak dengan pihak PMSC. Selain itu, tidak adanya rantai komando dalam keterlibatan kontraktor PMSC di lapangan mempermudah bagi pihak pengontrak untuk memberi misi merayap klandestin yang ikut dibonceng dalam misi yang ditunjukan ke publik.

Terlepas dari fakta tersebut, Terdapat 3 faktor yang menjadi alasan penggunaan PMSC oleh pemerintah AS dalam kejadian Pemberontakan di Irak 2013. Alasan pertama yaitu alasan politik. Pemerintahan Amerika Serikat pada masa itu memilih untuk menggunakan PMSC sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra negara yang pada masa pemerintahan sebelumnya, George W. Bush, memiliki imej sebagai suatu negara yang *warmonger* dimana AS tidak segan-segan menginvasi negara terduga penyembunyi jaringan teroris.

Alasan kedua yaitu alasan Ekonomi. Penggunaan PMSC dalam suatu konflik jauh lebih murah jika dibandingkan penggunaan militer negara, ditambah juga dengan adanya *return interest* dari PMSC tersebut ketika membayar pajak tahunan.

Alasan ketiga, yaitu alasan Sosial yaitu penggunaan PMSC sebagai bentuk dukungan pemerintah AS terhadap aspirasi masyarakat internasional yang menginginkan AS untuk menarik pasukan militer negaranya dari negara-negara Timur Tengah yang di okupasi.

**Daftar Pustaka**

**Buku, Jurnal, Artikel Koran, Artikel Internet**

DynCorp International. *What We Do – Training.* Terdapat di https://www.dyn-intl.com/what-we-do/training/

G4S. *Acquisition of Rock Stead Group of Companies.* Terdapat di https://www.g4s.com/investors/news-and-presentations/regulatory-announcements/2008/03/04/acquisition-of-rock-steady-group-of-companies

G4S. *G4S Complete Acquisition of ARMORGROUP International PLC.* Terdapat di https://www.g4s.com/media-centre/news/2008/05/07/g4s-completes-acquisition-of-armorgroup-international-plc

G4S. *G4S Completes Acquisition of Global Solutions Limited.* Terdapat di https://www.g4s.com/media-centre/news/2008/05/12/g4s-completes-acquisition-of-global-solutions-limited-gsl

Merle, Renae. 2006. *Census Counts 100,000 Contractors in Iraq.* Washingtonpost.

Ortiz, Carlos. 2010. *Regulating Private Military Companies: States and the Expanding Business of Commercial Security Provision*. Denver: Praeger.

Pingeot, Lou. 2014. *The United Nations Guidelines on the Use of Armed Private Security.* Researchgate.

Pingeot, Lou. 2012. *Dangerous Partnership: Private Military & Security Companies and the UN:* New York: GPF

Prince, Eric. 2013. *Civilian Warriors: The Inside Story of Blackwater and the Unsung Heroes of the War on Terror,* The Penguin Group

Rosenau, James N. 1982. *Provocation and Proof in World-System Analysis*. Harvard University Press.

Singer, Peter W. 2002. *Corporate Warriors: The Rise of The Privatized Military Industry and Its Ramifications for Internasional Security.* International Security 26,no.3.

Singer, Peter W. 2005. *Outsorcing War*. Foreign Affairs 84,no.2

Stanley, Bruce E. 2015. *Outsourcing Security: Private Military Contractors and U.S. Foreign Policy* : Potomac Books.

Stoner, James A. F. 1986. *Management*. London: Pearson.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : g.vilmant@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)